KATA PENGANTAR

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Penyusunan Renja juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam visi Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agais untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Kandangan, Januari 2019 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

DAFTAR ISI

		Hal
KATA I	PENGANTAR	1
DAFTA	R ISI	2
DAFTA	R TABEL	3
BAB I I	PENDAHULUAN	
1.1	LATARBELAKANG	4
1.2	LANDASAN HUKUM	4
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN	LALU
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN L	ALU
	DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO	8
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO	11
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	FUNGSI
	DISKOMINFO	12
2.4	REVIEW TERHADP RANCANGAN AWAL RKPD	15
2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	MASYARAKAT	15
BAB III	TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	15
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFO	15
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	16
DAD IX	DENIMID	10

LAMPIRAN

- RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 20	19
	DENGAN TRIWULAN IV	8
TABEL 2.2	CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO KAB. HSS	
	TAHUN 2019 TRIWULAN IV	10
Tabel 2.3	ISU STRATEGIS DISKOMINFO BERDASARKAN	
	TUPOKSI	. 11
TABEL 3.1	PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPA	TEN
	HULU SUNGAI SELATAN	16
TABEL 3.2	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNI	KASI
	DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU	SUNGAI
	SELATAN TAHUN 2019	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang mengacu pada pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui Tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dengan rinci dan operasional Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pembangunn selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan viss Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu "Menuju Kabupaten HSS Yang Cerdas, Inovatif, Teknologi dan Agais untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat "

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
- 2. Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)
- 7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dn Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembanguan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dn Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi din Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten HSS sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubaha Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D.Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun Lalu (Tahun 2018) dan Capaian Renstra DISKOMINFO

Di tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS akan melaksanakan 7 program dengan 25 Kegiatan, terdapat penambahan kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Sandi pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdiri pada Januari 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 Sampai Dengan Triwula II

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4			7	8	9	10
1	Berkembanganya tata kelola pemerintahan berbasis e- government	% Perangkat Daerah yang sudah menerapkan e- Government / aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	45: 45 x 100 = 100%	Triwulan IV	100%		Pembinaan dan		
		% Pemenuhan informasi pemerintahan pada server center Diskominfo	39 : 50 X 100 = 78%	Triwulan IV	2%	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	3,822,591,250	3.137.520.500
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan	% fasilitas umum yang sudh memiliki wifi	24 : 24 x 100 = 100%	Triwulan IV	104,17%				
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% layanan pengaduan masyarakat secara elektronik yang ditanggapi tepat waktu	864 : 864 x 100 = 100%	Triwulan IV	85,53%		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	24,000,000	24.000.000

		% SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	46:46 x 100 = 100%	Triwulan IV	100%	Kerjasama informasi dengan media massa	Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah	123,550,000	108.050.000		
4						Kerjasama informasi dengan media massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2,171,300,000	2,027,410,000		
	Membangun citra positif Kabupaten Hulu Sungai Selatan	% kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	538 : 538 x 100 = 100 %	Triwulan IV	127,32%			Pengembangan Komunikasi, Informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPPL Kandangan TV	135,950,000	131,965,000
						dan Media Massa	Operasional Paket Acara LPPL Kandngan TV	529,800,000	464.105.503		
5	Tersedianya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan pelayanan	% informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan	538: 538 x 100 = 100 %	Triwulan IV	67,66%	Program Pengelolaan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Pelayanan Sandi	79,120,000	0		
	dokumen aktif statistik sektoral	% Dokumen aktif statistik sektoral yang tersedia	4:4 x 100 = 100%	Triwulan IV	125%	Bacran	Penyusunan dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah	156,830,000	76,250,000		
6	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	Triwulan IV							

	Tingkat pemenuhan SPM bidang Informatika	6	Triwulan IV			
	Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	Triwulan IV			

Sedangkan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai triwulan IV tahun 2019 seara ringkas dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 2.2 Capaian Kinerja DISKOMINFO KAB. HSS Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV

	REALISASI								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPA KINE	AIAN				
1	2	3	4		5				
1	Berkembanganya tata kelola pemerintahan berbasis e- government	% Perangkat Daerah yang sudah menerapkan e- Government / aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	45: 45 x 100 = 100%	Triwulan IV	100%				
		% Pemenuhan informasi pemerintahan pada server center Diskominfo	39 : 50 X 100 = 78%	Triwulan IV	2%				
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan	% fasilitas umum yang sudh memiliki wifi	24:24 x 100 = 100%	Triwulan IV	104,17%				
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% layanan pengaduan masyarakat secara elektronik yang ditanggapi tepat waktu	864: 864 x 100 = 100%	Triwulan IV	85,53%				
		% SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	46:46 x 100 = 100%	Triwulan IV	100%				
4	Membangun citra positif Kabupaten Hulu Sungai Selatan	% kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	538: 538 x 100 = 100 %	Triwulan IV	127,32%				
5	Tersedianya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan pelayanan	% informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan	538: 538 x 100 = 100 %	Triwulan IV	67,66%				
	dokumen aktif statistik sektoral	% Dokumen aktif statistik sektoral yang tersedia	4:4 x 100 = 100%	Triwulan IV	125%				

6	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	Triwulan IV	
		Tingkat pemenuhan SPM bidang Informatika	6	Triwulan IV	
		Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	Triwulan IV	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

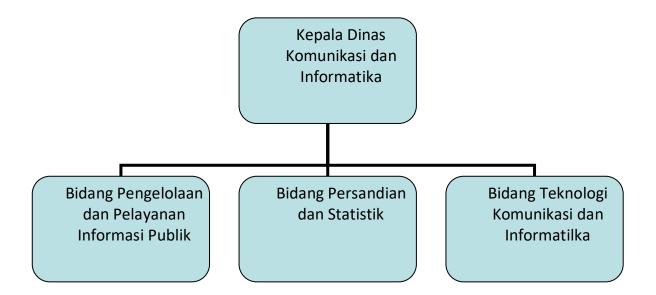
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada Triwulan IV tahun 2019 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusn pemerintaha harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewjiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 3 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sseperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1 Pembagian Bidang Diskominfo Kab. HSS



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Isu Strategis Diskominfo Berdasarkan Tupoksi

TugasPokok	Fungsi	IsuStrategis
Melaksanakan		Belum Terintegrasinya
Urusan		Database dan Layanan
Pemerintahan di		e-Governance
bidang	1. penyusunan	e-Governance
pengelolaan dan	kebijakan teknis	
pelayanan	urusan Pemerintahan	Belum Efisiensinya
informasi publik,	di bidang pengelolaan	Infrstruktur
teknologi	dan pelayanan	Telekomunikasi
komunikasi dan	informasi publik,	
informatika,	teknologi komunikasi	Berkembangnya
persandian dan	dan informatika,	teknologi informasi
statistik serta	persandian dan	berdampak pada
tugas	statistic	informasi yang negatif
pembantuan		dan tidak dapat
yang diberikan		dipertanggungjawabka
kepada Daerah.		n

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan jauh berbeda dengan rancangan tahun sebelumnya, di tahun 2019 terdapat 1 (satu) penambahan kegiatan yaitu pada Program PPengelolaan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan nama kegiatan Peningkatan Pelayanan Sandi.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di awal tahun 2019 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, belum ada usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan paradigm baru di era globalisasi yaitu Techno Economy, teknologi menjadi factor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjasinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energy untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentka tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatalah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah harus berjalan beriringan dalam mengembangkan potensi daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya animo masyarakat yang berusaha berinteraksi dengan pemerintah daerah khusunya tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Hlu Sungai Selatan yang harus diantisipsi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HSS

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terkait penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Adapaun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pelyanan Informasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, dan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- 2.5.1 Belum terintegrasinya Database dan layanan e-Governance
- 2.5.2 Belum Efisienya Infrstruktur Telekomunikasi
- 2.5.3 Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Berdasarkan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 3.1

Penjabaran visi, misi dan tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatnya
kuantitas dan kualitas	infrastruktur ekonomi	pemenuhan sarana
infratsruktur fisik,	dan sosial yang	prasarana teknologi
ekonomi dan sosial	berkualitas	informasi
yang menunjang		
sektor perekonomian		
Mewujudkan tata	Meningkatkan tata	Meningkatnya
kelola pemerintahan	kelola pemerintahan	penggunaan sistem
yang baik dan bersih	yang baik dan bersih	informasi daerah
serta pelayanan	serta layanan publik	
publik yang	yang berkualitas	
berkualitas berbasis	berbasis teknologi	
teknologi informasi	informasi	
dalam kehidupan	Membangun Citra	Berkembangnya
yang agamis	Positif Pemkab	teknologi informasi
	Kabupaten HSS	berdampak pada
		informasi yang negatif
		dan tidak dapat
		dipertanggungjawabkan

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebiakan yang berisi satu atau lebih kegiaan yang dilasksanakan oleh SKPD atau maasyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Semntara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaiana sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 – 2023 dan disususn dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Hal tersebut tertuang dalam table berikut :

Tabel 3.2

Uraian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

		Ren	cana Tahun 201	9 (N)
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	(2)	(5)	(6)	(7)
	Non Urusan			
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	5 orang;	19,500,000	Pendapatan Daerah
2	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan;	1,428,000	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5,500,000	Pendapatan Daerah
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan;	63,524,000	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan;	21,022,600	Pendapatan Daerah
6	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2 kegiatan;	11,220,000	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7 rekening;	60,000,000	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	6 media;	30,660,000	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 unit;	3,800,000	Pendapatan Daerah
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan;	8,670,000	Pendapatan Daerah
7	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan;	21,300,000	Pendapatan Daerah
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0;	200,000,000	Pendapatan Daerah

9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75.000.000	75,000,000	Pendapatan Daerah
10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.400.000	21,200,000	Pendapatan Daerah
В	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit;	46,100,000	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan;	31,620,000	Pendapatan Daerah
С	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen;	2,550,000	Pendapatan Daerah
	Wajib			
	Statistik			
D	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			
1	Peningkatan Pelayanan Sandi	0;	107,900,000	Pendapatan Daerah
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	2 jenis buku;	177,180,000	Pendapatan Daerah
	Komunikasi dan Informatika			
E	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1 data;5 buah ;2 lokasi ;20 desa;	128,000,000	Pendapatan Daerah
2	Fasilitasi Paket Acara LPPL Kandanga TV	12 paket;	445,800,000	Pendapatan Daerah
3	Pembinaan dan pengembangan komunikasi, Informasi, dan Media massa	0;	433,102,200	Pendapatan Daerah
4	Fasilitasi sarana dan prasarana LPPL Kandangan TV	1 studio;	140,950,000	Pendapatan Daerah
F	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
1	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	50 peserta;	5,365,000	Pendapatan Daerah
G	Program Kerjasama Informsi dan Media Massa			
1	Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah	0;	124,320,000	Pendapatan Daerah
1	Penyebarluasan Informasi Permbangunan Daerah	4 Kegiatan ;	1,902,600,000	Pendapatan Daerah
2	Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	4 kegiatan;	71,624,000	Pendapatan Daerah
			4,159,935,800	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena SKPD tersebut bari berdiri pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai Renja review, pedoman dokumen bersumber dari pecahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelumnya.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat member umpat balik yang positif dalam pengambilan keuptusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembanguna daerah yang berkualitas oleh para peimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kea rah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat dengan pembangunan IPTEK melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam mewujudkan Good Governance.

Kandangan, Januari 2019 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020(Rancangan Awal) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

	Kode			Urusan/Bidang Urusan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Detail	Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100%	1,215,164,400			0 Indeks	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Jumlah paket pengiriman Jumlah ATK Jumlah cetak dan penggandaan	1 tahun 32 jenis 3 jenis	65,834,400	Pendapatan Daerah		0 tahun 0 jenis 0 jenis	0
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	KabupatenJumlah Rekening Air, Listrik, Telpon dan internet	O rekening	362,880,000	Pendapatan Daerah		O rekening	0

0	0	1	5	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pelayanan informasi	2 event	11,000,000	Pendapatan Daerah	O event	0
0	0	1	6	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman	4 kegiatan	21,500,000	Pendapatan Daerah	0 kegiatan	0
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas /Operasional 2 unit	2 unit	6,000,000	Pendapatan Daerah	O unit	0
0	0	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Jumlah iuran asurasi BPJS yang di bayarkan	5 orang 22 orang	103,950,000	Pendapatan Daerah	O orang O orang	0
0	0	1	9	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan		Indeks Kepuasan Pelayanan Intern	82	322,000,000	-	0	0
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi ke luar daerah	1 tahun	250,000,000	Pendapatan Daerah	O tahun	0

(0 0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten	Jumlah rapat-rapat konsultasi dalam daerah	1 tahun	72,000,000	Pendapatan Daerah	O tahun	0
() C	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100%	749,701,800		0 Indeks	
	0 0	2	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Pengadaan alat kantor umum umum Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis 4 jenis	294,501,800	Pendapatan Daerah	0 jenis 0 jenis	0
() C	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Tingkat Kepuasan Pelayanan	100%	146,100,000	-	0	0
() C	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit	69,600,000	Pendapatan Daerah	O unit	0
(0 0	2	31	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Servis peralatan kantor	12 bulan 65 unit	239,500,000	Pendapatan Daerah	O bulan O unit	0

0	0	7		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP; Tingkat Pemenuhan Aspek Dokumen Keuangan Daerah	100 Persen ;100 Persen	9,000,000		O Persen ;O Persen	
0	0	7	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan SKPD	5 Dokumen	2,500,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	7	7	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah jenis pelaporan keuangan SKPD	3 jenis	2,500,000	Pendapatan Daerah	0 jenis	0
0	0	7	8	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah laporan dan dokumen akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan perangkat daerah	5 Iaporan	4,000,000	Pendapatan Daerah	0 Iaporan	0
				Wajib	1	<u></u>					
	18			Komunikasi dan Informatika							

18	21		Program Pelayanan Informasi dan Media Massa		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); Persentase Kegiatan Pemerintah Kabupaten HSS yang Terpublikasi	100 Persen ;100 Persen	4,337,700,000		0 Persen ;0 Persen	
18	21	1	Peningkatan Sarana dan PrasaranaLPPL Kandangan TV	SKPD	Peralatan stuido dan personal komputer	3 paket	835,175,000	Pendapatan Daerah	O paket	0
18	21	2	Paket Acara LPPL Kandangan TV	SKPD	Paket acara	9 Paket	579,300,000	Pendapatan Daerah	0 Paket	0
18	21	3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	SKPD	Kerjasama dengan media	4 media	2,798,880,000	Pendapatan Daerah	0 media	0
18	21	4	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumnentasi Daerah	SKPD	Koordinasi PPID	1 kegiatan	124,345,000	Pendapatan Daerah	0 kegiatan	0

18	23		Program Pemanfaatan Teknologi Informasi		Jumlah Aplikasi e- Government yang berfungsi dengan baik ; Jumlah SKPD/Desa yang Terkoneksi dengan Intranet ke Server Center Diskominfo	10 SKPD;14 SKPD	4,126,320,000		O SKPD;O SKPD	
18	23	1	Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi	Kabupaten	Retribusi Menara Telekomunikasi	0	1,700,600,000	Pendapatan Daerah	0	0
18	23	2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Kabupaten	Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi e- Government	1 tahun	2,230,530,000	Pendapatan Daerah	O tahun	0
18	23	3	Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Kabupaten	Sosialisasi aplikasi e-Goverment	0	5,175,000	Pendapatan Daerah	0	0
18	23	4	Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	Kabupaten	sosialisasi teknologi dan informatika	0	26,520,000	Pendapatan Daerah	0	0

18	23	5	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi		SKPD yang terkoneksi jaringan internet dan atau intranet ke Server Center Diskominfo	15 SKPD	68,495,000	-	O SKPD	0
18	23	6	Peningkatan Pelayanan Akses Internet		SKPD yang terkoneksi jaringan internet dan atau intranet ke Server Center Diskominfo	15	50,000,000	-	0	0
18	23	7	Peningkatan Pelayanan E-Goverment		Jumlah aplikasi e- Governement yang terintegrasi di server center Diskominfo	5 SKPD	45,000,000	-	0 SKPD	0
23			Persandian	<u> </u>	1	<u> </u>				
23	22		Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah		Jumlah Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	3 Jenis	99,625,000		0 Jenis	
23	22	1	PENINGKATAN PELAYANAN SANDI	Kabupaten	Sosialisasi pengamanan informasi pada media elektronik	1 kegiatan	7,720,000	Pendapatan Daerah	0 kegiatan	0

		DAIN BAR GIATIOTIC BALLATI		TOTAL		10,537,511,200	Dacran		0
23	22	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	Kabupaten	cetak Buku KCA dan KDA	2 jenis buku	91,905,000	Pendapatan Daerah	0 jenis buku	0

KATA PENGANTAR

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019. Penyusunan Perubahan Renja juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam visi Terwujudnya efektivitas komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Kandangan, Oktober 2019 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002

DAFTAR ISI

		Hal
KATA I	PENGANTAR	1
DAFTA	R ISI	2
DAFTA	R TABEL	3
BAB I I	PENDAHULUAN	
1.1	LATARBELAKANG	4
1.2	LANDASAN HUKUM	4
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN	LALU
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN L	ALU
	DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO	8
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO	12
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	FUNGSI
	DISKOMINFO	14
2.4	REVIEW TERHADP RANCANGAN AWAL RKPD	15
2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	MASYARAKAT	15
BAB III	TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	16
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFO	17
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	18
BAB IV	PENUTUP	19

LAMPIRAN

- RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1	CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO KAB. HSS	
	TAHUN 2019 TRIWULAN I	8
Tabel 2.2	ISU STRATEGIS DISKOMINFO BERDASARKAN	
	TUPOKSI	12
TABEL 3.1	PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPAT	EN
	HULU SUNGAI SELATAN	15
TABEL 3.2	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIK	KASI
	DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU S	UNGAI
	SELATAN TAHUN 2019	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang mengacu pada pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui Tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dengan rinci dan operasional Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai acuan pembangunn selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan viss Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu "Menuju Kabupaten yang cerdas, inovatif", teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat"

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)
- 6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembanguan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi din Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dn Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi dn Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten HSS sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Perubaha Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D.Sistimatika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- A.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO sampai dengan Triwulan Ii tahun 2019 dan Capaian Renstra DISKOMINFO

Di tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS akan melaksanakan 7 program dengan 25 Kegiatan, terdapat penambahan kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan Sandi pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Berikut merupakan penjabaran evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, yang tertuang dalam table di bawah ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja DISKOMINFO Kab. HSS Triwulan II tahun 2019

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasar an/Program Tahun 2019		Target Triwulan			Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
					TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88	0	o	100%	0	0	o	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	81,89 (A)				81,89 (A)									
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26			100%	100%			
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11			100%	100%			
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10			100%	100%			

PENCAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TRIWULAN II

Sasaran Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Tujuan/Sasar Satuan an/Program Tahun 2019			Target Triwulan			Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4	TW 1	TW2	TW3	TW4
Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas	Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi	%	100%	20%	53%	80%	100%	7%	133%			7%	133%		
Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD/Desa yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%		
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%		
Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan	SKPD yang terkoneksi jaringan internet dan atau intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	15 SKPD	3	8	13	15	1	20			7%	133%		
Akses Internet Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik	%	100%	40%	80%	100%		120%	260%			120%	260%		
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah aplikasi e-Governement yang terintegrasi di server center Diskominfo	Aplikasi	5 Aplikasi	2	4	5		6	13			120%	260%		
Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS	Rasio berita positif dan negatif di media massa tentang Kabupaten HSS	Berita	500	150	300	450	500	202	213			40%	43%		
Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	PD	38	38				38							

	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	%	100%	30%	60%	90%	100%	40%	43%		40%	43%	
Kegaiattan Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	PD	38	38				38					
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kegiatan Peningkata Sarana dan Prasarana LPPL Kandangan TV	Jumlah Produksi Informasi Yang Terpublikasi	Informasi	500	150	300	450	500	202	213		40%	43%	
Kegiatan Paket Acara LPPL Kandangan TV													

PENCAPAIAN KINERJA URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK TRIWULAN II

Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasar an/Program Tahun 2019		Tarş	get Triv	vulan	Re	ealisasi	Triwula	ın		Capai	an (%)	
					TW	mario	TILLO.	77XX / 4	TW	mario	W1110	TDY 1.4	TW	muno	mario	(DYX 4
					1	TW2	TW3	TW4	1	TW2	TW3	TW4	1	TW2	TW3	TW4
	Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian	Dokumen statistik yang tersedia	Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen								
		%Pengamanan informasi daerah	%	100%				100%								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

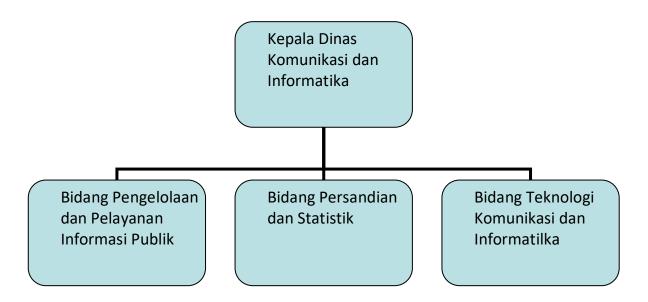
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai pada Triwulan II tahun 2019 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan wajib bukan urusan dasar bidang pemerintahan Komunikasi dan Informatika, harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewjiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 3 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sseperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini

Gambar 2.1
Pembagian Bidang Diskominfo Kab. HSS



Di tahun 2019 mulai dibangun sarana dan prasarana Data Center oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS. Sementara itu aplikasi pemerintah yang terintegrasi pada triwulan II tahun 2019 ini hampir mencapai target. Dari 45 aplikasi pemerintah yang terintegrasi, sebanyak 43 yang telah dibuat. Namun demikian belum semuanya dapat diterapkan.

Pemenuhan informasi pada Server Center Diskominfo juga belum dapat dilaksanakan, mengingat pembangunan Data Center masih berlagsung.

Fasilitas umum berupa gazebo dan wifi gratis telah tercapai 22 unit yang sudah terbangun sampai dengan triwulan II pada tahun 2019 ini.

Pada indikaor persentase layanan pengaduan masyarakat secara elektronik yang ditanggapi tepat waktu pada triwulan II tahun 2019 ini telah tercapai 32,52% yaitu sebanyak 281 berupa sms yang dikirimkan oleh masyarakat dan ditanggapi oleh pemerintah daerah melalui siaran langsung pada stasiun radio local. Selanjutnya, pada indikator prersentase SKPD yang sudah Keterbukaan Informasi melaksanakan Public (KIP) yang dikoordinasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan II tahun 2019 ini telah berhasil mencapai target dari 46 SKPD yang ditargetkan. Sementara itu pada indikator persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi telah mencapai target sebesar 63,33%, yaitu sebanyk 341 kegiatan yang dapat dipublikasi dari 538 yang ditargetkan.

Pada indikator persentase informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan masih tercapai sebesar 11,90%, yaitu sebanyak 64 informasi yang bersumber dari telegram senopati yang diterima. Sumber informasi lain masih belum bisa dilakukan pengamanan oleh Diskominfo Kab. HSS mengingat peralatan yang belum maksimal tersedia serta belum adanya sandiman.

Selanjutnya pada indikator persentase dokumen aktif statistic sektoral yang tersedia baru bisa dilaksanakan pada triwulan III mendatang dikarenakan ada perubahan beberapa item belanja langsung dan menunggu pengesahan Perubahan Anggaran 2019.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Isu Strategis Diskominfo Berdasarkan Tupoksi

	910 2101101111110 201440411	-
Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan		Belum
Urusan		terintegrasiya
Pemerintahan di		database dan
bidang		layana E-
pengelolaan dan	Penyusunan kebijakan	Government
pelayanan	teknis urusan	
informasi publik,	Pemerintahan di bidang	Belum Efisiensinya
teknologi	pengelolaan dan pelayanan	Infrastruktur
komunikasi dan	informasi publik, teknologi	telekomunikasi
informatika,	komunikasi dan	
persandian dan	informatika, persandian	
statistik serta	dan statistic	Keterbatasan akses
tugas		masyarakat
pembantuan		terhadap Informasi
yang diberikan		torridaep imormasi
kepada Daerah.		

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbeda dengan rancangan awal. Pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 ini terdapat pengurangan sebesar 1% dari total anggaran belanja langsung. Pengurangan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor SE-910/656/BAKEUDA perihal Pedomann Penyusunan RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2019. Selain terdapat beberapa perubahan belanja langsung pada kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan urgenitas.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan di awal tahun 2019 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, dan saat ini belum ada usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 2 KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi factor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjasinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energy untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentka tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan Bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatalah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah harus berjalan beriringan dalam mengembangkan potensi daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya animo masyarakat yang berusaha berinteraksi dengan pemerintah daerah khusunya tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus diantisipsi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HSS

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu terkait penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Adapaun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan dan Pelyanan Informasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik, dan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- 2.5.1 Belum terintegrasinya Database dan layanan e-Governance
- 2.5.2 Belum Efisienya Infrstruktur Telekomunikasi
- 2.5.3 Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Berdasarkan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selata

Tabel 3.1

Penjabaran visi, misi dan tujuan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MISI	TUJUAN	SASARAN				
Berkembangnya tata	Berkembangnya tata	Berkembangnya tata				
kelola pemerintahan	kelola pemerintahan	kelola pemerintahan				
berbasis e-Goverment	berbasis e-Goverment berbasis e-Goverm					
Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas	Meningkatnya kualitas				
infrasrtuktur jaringan	infrasrtuktur jaringan	infrasrtuktur jaringan				
Mewujudkan	Mewujudkan	Terwujudnya				
peningkatan Kualitas	peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas				
Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
Membangun citra	Membangun citra	Membangun citra				
positif Kabupaten HSS	positif Kabupaten HSS positif Kabupater					
Melaksanakan	Melaksanakan	Terlaksananya				
pengamanan informasi	pengamanan informasi	pengamanan informasi				
pemerintah daerah	pemerintah daerah	Pemerintah Daerah				
dan layanan dokumen	dan layanan dokumen	dan Layanan				
aktif statistic	aktif statistic	Dokumen Aktif				
		Statistik Sektoral				
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan				
Kapasitas dan	Kapasitas dan	Kapasitas dan				
Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja				

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Sementara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 – 2019 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Hal tersebut tertuang dalam table berikut :

Tabel 3.2

Uraian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Perubahan Anggaran



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKAP SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun Anggaran 2019

Urusan2Urusan Wajib Bukan Pelayanan DasarBidang2 . 10Komunikasi dan InformatikaUnit Organisasi2 . 10 . 01Dinas Komunikasi dan InformatikaSub Unit2 . 10 . 01Dinas Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

D		LOKASI	TARGET	Sumb	JUMLAH	I (Rp)	BERTAMBAH/(BERK	URANG)
o	URAIAN	KEGIATAN	KINERJA	er Dana	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	9/
	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		82 Indeks		2.449.135.400,00	2.540.735.400,00	91.600.000,00	
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	1 Tahun	3	87.013.400,00	87.013.400,00	0,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten,SK	1 Tahun	3	897.320.000,00	993.120.000,00	95.800.000,00	1
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi	Kabupaten	1 Tahun	3	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	1 Tahun	3	23.352.000,00	23.352.000,00	0,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	1 Tahun	1	1.084.950.000,00	1.080.750.000,00	(4.200.000,00)	((
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	1 Tahun	3	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		82 Indeks		698.497.300,00	787.637.300,00	89.140.000,00	:
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	1 Tahun	1	499.097.300,00	587.337.300,00	88.240.000,00	1
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	1 Tahun	3	46.100.000,00	47.000.000,00	900.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	1 Tahun	3	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	1 Tahun	3	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 Persen		9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	12 Dokumen	3	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	15 Dokumen	3	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	
F	Peruba Program: Relaya Kenjin Dishosi da fo Media Massa HSS		100 Persen	20	3.420.735.000,00	3.425.235.000,00	4.500.000,00	
	Peningkatan Sarana dan PrasaranaLPPL Kandangan TV	SKPD	526	1	458.650.000,00	463.150.000,00	4.500.000,00	
	Paket Acara LPPL Kandangan TV	SKPD	526	1	269.100.000,00	269.100.000,00	0,00	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	SKPD	526	1	2.679.030.000,00	2.679.030.000,00	0,00	
	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumnentasi Daerah	SKPD	38 SKPD	3	13.955.000,00	13.955.000,00	0,00	

	REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
кор		LOKASI	TARGET	Sumb	JUML	AH (Rp)	BERTAMBAH/(BERK								
PRO	URAIAN	KEGIATAN	KINERJA	er Dana	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%							
	3	4	5	6	7	8	9	10							
	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah		3 Jenis		99.845.000,00	88.055.000,00	(11.790.000,00)	(11,81)							
	PENINGKATAN PELAYANAN SANDI	Kabupaten	240 Telegram	3	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00							
	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	Kabupaten	3 Buku	1	92.105.000,00	80.315.000,00	(11.790.000,00)	(12,80)							
	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi		14 SKPD		970.040.000,00	1.320.040.000,00	350.000.000,00	36,08							
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Kabupaten	5 Aplikasi	1	836.780.000,00	1.186.780.000,00	350.000.000,00	41,83							
	Sosialisasi Kegiatan Teknologi dan Informatika	Kabupaten	15 SKPD	1	41.905.000,00	49.250.000,00	7.345.000,00	17,53							
	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Kabupaten	15 SKPD	1	41.355.000,00	34.010.000,00	(7.345.000,00)	(17,76)							
	Peningkatan Pelayanan Akses Internet	Kabupaten	15	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00							
			JMLAH	7.647.802.700,00	8.171.252.700,00	523.450.000,00	6,84								

KANDANGAN, 08 July 2019 **Kepala Dinas**

Drs. HENDRO MARTONO, MT

NIP. 19730309 199402 1 002

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten HSS

21

Halaman 2

Formulir RKAP SKPD 2.2

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 disusun sebagai pelaksanaan tahun kedua bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena SKPD tersebut baru berdiri pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat memberi umpan balik yang positif dalam pengambilan keuptusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para peimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat dengan pembangunan IPTEK melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam mewujudkan Good Governance.

> Kandangan, Oktober 2019 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Drs. Hendro Martono, MT

Pembina Tk. I

19730309 199402 1 002